

LAPORAN TRIWULAN IV

PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



20
25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Triwulan IV Tahun Anggaran 2025* dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai rencana.

Harapan kami, laporan monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan maupun kendala dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, semoga laporan ini juga dapat mendukung pengembangan sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,



Reni Ahiantini
NIP.196910181996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I: PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
BAB II: PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	5
2.1 Kebijakan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP di Tahun 2025	5
2.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP pada Tahun 2025	6
2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	17
2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	18
2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik	21
2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik	22
2.7 Survei Layanan Informasi Publik	23
BAB III: KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	25
3.1 Kendala Layanan Informasi Lingkup Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	25
3.2 Kendala dalam Layanan Informasi Lingkup Unit Kerja	25
BAB IV: REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	26
4.1 Rekomendasi	26
4.2 Tindak Lanjut	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik memiliki kewajiban membuka akses informasi bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Melalui prinsip keterbukaan, Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian PUPR, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta pengelolaan struktur organisasi PPID.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memiliki maksud untuk mendokumentasikan pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Adapun tujuan laporan ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Menjadi sarana evaluasi dan monitoring atas kinerja layanan informasi publik.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

2.1 Kebijakan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP di Tahun 2025

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan internal yang memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penetapan standar layanan informasi publik. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penajaman dan memperkaya informasi pada 3 (tiga) klasifikasi informasi di lingkungan Pekerjaan Umum yang telah disusun sejak tahun 2015 yaitu:

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Sebagai upaya penguatan PPID tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus melakukan sosialisasi atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pekerjaan Umum.

2.1.1 Adapun beberapa kebijakan internal yang merupakan implementasi UU KIP Tahun 2025 adalah:

1. Telah terdapat SK PPID DJPI Nomor 56/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 Tahun 2024 Pembentukan TIM Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Telah terdapat SK SP4N Lapor di lingkungan DJPI Nomor 79/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Telah terdapat SK PIC Pengelolaan Aplikasi Nomor 10 /KPTS/Ps/2024 Tahun 2024 Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Telah terdapat SK Standar Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Perumahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. SOP Sistem Informasi Aplikasi Pengaduan.

2.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP pada Tahun 2025

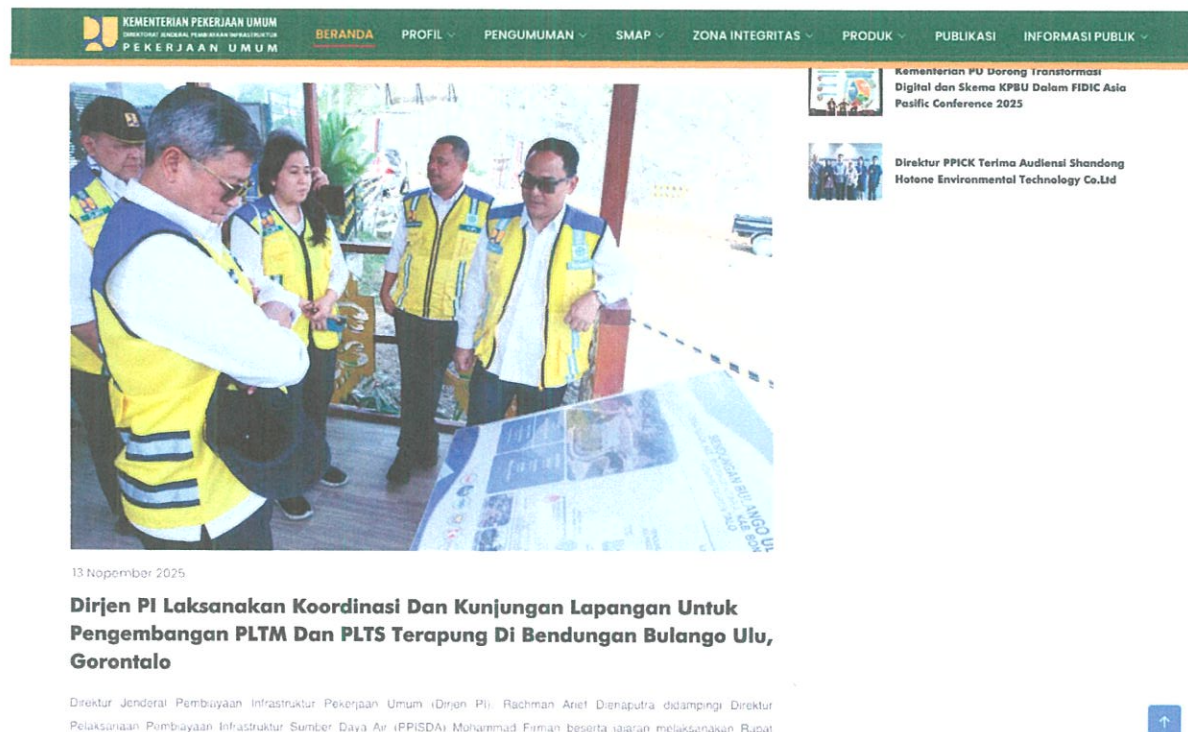
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki **website resmi** yang terintegrasi dengan portal Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu melalui alamat pembiayaan.pu.go.id.

Melalui website ini, DJPI menyampaikan berbagai informasi terkait:

- Profil organisasi dan struktur unit kerja,
- Kebijakan, regulasi, dan program kerja pembiayaan infrastruktur,
- Informasi publik terkait layanan, termasuk mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
- Data pendukung dan publikasi,
- Layanan pengaduan serta permohonan informasi publik.

Seluruh data dan informasi yang tersedia di website diperbaharui secara berkala maupun sesuai kebutuhan, sebagai wujud komitmen DJPI dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Website DJPI



The screenshot displays the official website of the Directorate General of Public Infrastructure Financing (DJPI). The header features the logo of the Ministry of Public Works and Infrastructure (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM) and a navigation menu with links: BERANDA, PROFIL, PENGUMUMAN, SMAP, ZONA INTEGRITAS, PRODUK, PUBLIKASI, and INFORMASI PUBLIK. The main content area shows a large photograph of several officials in yellow safety vests reviewing a large map or plan on a table. Below the photo, the date "13 November 2025" is displayed, followed by the article title: "Dirjen PI Laksanakan Koordinasi Dan Kunjungan Lapangan Untuk Pengembangan PLTM Dan PLTS Terapung Di Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo". The article text begins with "Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI) Rachman Anet Dienaputra didampingi Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Muhammad Firman beserta jajaran melaksanakan Rapat". To the right of the main article, there are two smaller news items: "Kementerian PU Dorong Transformasi Digital dan Skema KPBU Dalam FIDIC Asia Pacific Conference 2025" and "Direktur PPICK Terima Audiensi Shandong Hotone Environmental Technology Co.,Ltd". A small blue square icon with a white upward arrow is located in the bottom right corner of the website preview.

Selain melalui website, DJPI juga memanfaatkan berbagai **media sosial resmi** sebagai sarana penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat, antara lain:

- **Instagram:** [@pu_djpi](#)
- **X (Twitter):** [@pu_djpi](#)
- **TikTok:** [@pu_djpi](#)
- **Facebook:** [Pembiayaan Infrastruktur PU](#)
- **YouTube Channel:** [@pu_djpi](#)

Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat interaksi publik terhadap program dan layanan DJPI.

Selain itu, setiap bulan Tim Komunikasi Publik DJPI secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan timeline dan strategi pengelolaan media sosial, termasuk penyusunan materi publikasi yang menampilkan capaian dan kinerja masing-masing unit kerja. Rapat ini dihadiri oleh Penanggung Jawab (PIC) dari setiap unit kerja guna memastikan keselarasan pesan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.

Timeline Komunikasi Publik DJPI Bulan Oktober Tahun 2025

TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 13 OKTOBER - 10 NOVEMBER 2025				
Hari/Tanggal	Kegiatan/Materi	Penanggungjawab	Format	Keterangan
	Postingan			
Senin/13 Oktober 2025	Repost dari Kemen PU mengenai JIAT	Kementerian PU	Reels	
Rabu/15 Oktober 2025	Konten Progres Sitinjau Lauik	PPIBM& Kompu	Reels	
Kamis/16 Oktober 2025	1. Shooting KPBU Solicited: Kolaborasi Pemerintah & Swasta Membangun Negeri 2. Upload Story IG: Pertanyaan interaktif terkait antusias audiens terhadap progres sitinjau lauik.	PSSPP dan Kompu	Shooting	1. Shooting dengan 4 talent (naskah sudah ada) 2. Pertanyaan interaktif "Hi Sobat DJPI, menanggapi postingan kita yang terbaru, seberapa besar antusias sobat dalam progres pembangunan ini: A. Antusias banget, B. Biasa saja. C. Skeptis

Jumat/17 Oktober 2025	Penjelasan Booth DJPI	Team Kompu	Reels	Penjelasan Booth DJPI sudah di take video (proses editing)
Sabtu 18 Oktober 2025	Konten Kunjungan Lapangan PPISDA	Tim Kompu dan PIC PPISDA	Feed	Bendungan Kallaroe
Senin/21 Oktober 2025	1. Bukan Cuma KPBU: Mengenal Beragam Skema Pembiayaan Kreatif untuk Negeri. 2. Shooting Testimoni PPIBM	1. Team Kompu 2. PIC PPICK & Kompu	1. Reels 2. Shooting	1. Re-Create materi Kementerian PU tentang Pembiayaan Kreatif 2. Testimoni : Pengguna Jalan (masyarakat, Driver, Pedagang di Rest Area)
Selasa/22 Oktober 2025	Shooting Testimoni PPICK	PIC PPICK & Kompu	Shooting	Testimoni Penerima Manfaat SPAM Jatiluhur satu (Bahas Konsep)
Rabu/23 Oktober 2025	KPBU Solicited: Kolaborasi Pemerintah & Swasta Membangun Negeri	PSSPP	Reels	
Kamis/24 Oktober 2025	1. Shooting KPBU Unsolicited: Ngide, Nego, Tender, Jalan!	PSSPP	1. Reels 2. Story	1. Shooting dengan 3 Talent (naskah sudah ada) 2. Pertanyaan Interaktif berupa "Hi Sobat DJPI, kemarin kita sudah

	2. Upload story IG: Membuka Sesi tanya jawab terkait KPBU Solicited audiens.			upload video terkait penjelasan KPBU Solicited. Nah bagi sobat DJPI yang masih bingung dan ada pertanyaan, yuk tuliskan pertanyaan kalian disini. Nanti mimin jawab yaa!
Jumat/25 Oktober 2025	Testimoni PPICK	PIC PPICK & Kompu		Testimoni Penerima Manfaat SPAM Jatiluhur satu (Bahas Konsep)
Senin/28 Oktober 2025	Sumpah pemuda	Team Kompu	Post	Desain Peringatan hari sumpah pemuda
Selasa/29 Oktober 2025	1. KPBU Unsolicited: Ngide, Nego, Tender, Jalan! 2. Upload story IG: Membuka Sesi tanya jawab terkait KPBU Unsolicited audiens.	PSSPP	1. Reels 2. Story	1. Upload konten 2. Pertanyaan Interaktif berupa "Hi Sobat DJPI, kita baru upload video terkait penjelasan KPBU Unsolicited. Nah bagi sobat DJPI yang masih bingung dan ada pertanyaan, yuk tuliskan pertanyaan kalian disini. Nanti

Rabu/30 Oktober 2025	Testimoni PPIBM	PPIBM	Reels	mimin jawab yaa! Testimoni : Pengguna Jalan (masyarakat, Driver, Pedagang di Rest Area)
Jumat/01 November 2025	Konten Layanan DJPI	Team Kompu	Post	
Senin/04 November 2025	Konten Kunjungan SPAM Balikpapan	Kompu dan PIC PPICK	Reels	
Rabu/06 November 2025	Kamus Istilah Pembiayaan Infrastruktur	Team Kompu	Post	
Minggu/10 November 2025	Memperingati hari pahlawan	Team Kompu	Post	
NB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Materi tidak ada, belum final atau tiba-tiba terjadi perubahan disiasati dengan konten Reposted 2. Time line bisa berubah sewaktu-waktu atau bisa jumping/tidak sesuai tanggal diutamakan yang selesai terlebih dahulu 				

Tanggal Shooting Kamis/16 Oktober 2025	Kegiatan KPBU Solicited	Penanggungjawab PSSPP dan Tim Kompu	Keterangan 4 Talent dari PSSPP (Backup dari Kompu)
Senin/21 Oktober 2025	Testimoni PPIBM	PPIBM dan Tim Kompu	Wawancara masyarakat ke lapangan
Selasa/22 Oktober 2025	Testimoni PPICK	PPICK dan Tim Kompu	Wawancara masyarakat ke lapangan
Kamis/24 Oktober 2025	KPBU Unsolicited	PSSPP dan Tim Kompu	3 Talent dari PSSPP (Backup dari Kompu)

Timeline Komunikasi Publik DJPI Bulan November Tahun 2025

TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 04 November - 31 NOVEMBER 2025				
Hari/Tanggal	Kegiatan/Materi Postingan	Penanggungjawab	Format	Keterangan
Selasa/04 November 2025	Infografis terkait siapa layak jadi mitra kpbu pembangkit listrik dari bendungan.	PPISDA & Kompu	Infografis post	(Sudah tayang)
Rabu/05 November 2025	KPBU Unsolicited	PPSPP & Kompu	Reels	(Sudah tayang)
Jumat/07 November 2025	Repost	IG PU		
Sabtu/08 November 2025	Repost	IG PU		
Minggu/09 November 2025	Promosi majalah DJPI	Tim Kompu	Postingan	
Senin/10 November 2025	Ucapan Hari besar pahlawan dan berita upacara DJPI	Team Kompu	Postingan	(Desain Mas Fahmi)
Rabu/12 November 2025	Postingan Rapat Kerja DJPI	Tim kompu	Reels	(Dokumentasi diharapkan untuk menyetek foto dan video untuk stok footage).
Jumat/ 14 November 2025	Postingan PPIBM Tol Getaci	PPIBM & Kompu	Feed	(Menunggu bahan/data dari PPIBM) (Menggunakan hook-problem-solutuion-CTA)

Senin/17 November 2025	Pembiayaan Kreatif	Tim Kompu	Postingan	Menggunakan Hook-Problem-Solution-CTA
Selasa/18 November 2025	Postingan PPISDA	PPISDA & Kompu	Reels/post	Potensi Bendungan Way Apu di pulau Buru, Maluku untuk KPBU Ketenegalistrikan.
Rabu/ 19 November 2025	Postingan Penghargaan PPICK	PPICK	Postingan	(sedang dalam draft surat dari PPICK sedang dilaporkan ke Pak Dirjen).
Kamis/20 November 2025	Kunjungan Lapangan PPICK ke SPAM Balikpapan	PPICK dan Kompu	Reels infografis	
Jumat/21 November 2025	Postingan PPIBM Tol Gilimanuk-Mengwi	PPIBM dan Kompu	Reels/post	(Menunggu bahan/data dari PPIBM) (Menggunakan hook-problem-solutuion-CTA)
Sabtu/22 November 2025	Carousel terkait penghargaan yang diterima DJPI			PPICK arsip dan BTAM. PSSPP Transformasi digital 5

Senin/24 November 2025	Kunjungan Lapangan Bendungan Bulango Ulu	PPISDA		besar, Sesditjen Arsip 3 besar. (Kunjungan Lapangan dilaksanakan pada 12-14 November 2025).
Rabu/ 26 November 2025	Istilah Pembiayaan (Hook-problem-solution-CTA)	Kompu	Reels/post	
Kamis/27 November 2025	Komparasi pemilahan dan pengolahan sampah terkait proyek Putri Cempo menjadi waste to energy. Dibagi dua bisa menjadi listrik atau bricket.	Kompu & PPICK	Feed	
Sabtu/29 November 2025	Hari KORPRI	Kompu	Post	
Minggu/30 November 2025	Nominasi pegawai teladan (Di DJPI ada 5)		Post	Pegawai muda teladan = Sofwan, Mba Arum, Mba Puput, Pegawai prestasi = Faisal dan Fajar SDA
Senin/31 November 2025	Postingan PPSPP	PPSPP	Reels/post	1. Infografis komparasi Solicited dan unsolicited 2. Video tentang kemitraan

(TuSi) JICA dan KIAT

NB:
1. Jika Materi tidak ada, belum final atau tiba-tiba terjadi perubahan disiasati dengan konten Reposted
2. Timeline bisa berubah sewaktu-waktu atau bisa jumping/tidak sesuai tanggal diutamakan yang selesai terlebih dahulu

Timeline Komunikasi Publik DJPI Bulan Desember Tahun 2025

TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 01 DESEMBER - 31 DESEMBER 2025

HARI/TANGGAL	KEGIATAN/MATERI POSTINGAN	PENANGGUNG JAWAB	FORMAT	KETERANGAN
Senin/ 01 Desember 2025	#Repost @KementerianPU Jejak Ir. Sutami dalam rangkaian kegiatan Harbak PU 2025	Kementerin PU	Repost	(sudah tayang)
	Postingan Berita Kegiatan DJPI : DJPI Gelar Peningkatan Integritas	PPICK	Feed	(sudah tayang)
Selasa/ 02 Desember 2025	#Repost @KementerianPU Sejarah singkat kemeterian PU	Kementerian PU	Repost	(sudah tayang)
	Ucapan ke 80 Kementerian PU	Tim Kompu	Feed	(sudah tayang)
Rabu/ 03 Desember 2025	Postingan Berita Kegiatan DJPI : Kementerian PU Gelar Upacara Hari Bakti ke-80 dan Mendapatkan Penghargaan	Tim Kompu	Feed	(sudah tayang)
Kamis / 04 Desember 2025	Corussel : Penjelasan Materi Getasik (Gedebage-Tasikmalaya)	PPIBM	Postingan	(sudah tayang)
Minggu / 07 Desember 2025	Postingan Berita Kegiatan DJPI : Kementerian PU lakukan sosialisasi JF API	Kepegawaian dan Umum	Postingan	(sudah tayang)
Senin/ 8 Desember 2025	Liputan Acara MR KPBU	PSSPP		
Selasa/ 09 Desember 2025	Postingan Korupsi/ SUAP DJPI karena ada (Hari Anti Korupsi Internasional)	Tim Kompu	Postingan	

Rabu/ 10 Desember 2025	Kunjungan Lapangan Bendungan Bulango Ulu	PPISDA	Reels	Materi sudah ada
Kamis / 11 Desember 2025	konten terkait gilimanuk-mengwi	Mengunggu masukan PPIBM	Feed	
Jumat / 12 Desember 2025	Pemblayaan Kreatif	Mengunggu ACC (PSSPP)	Feed	
Sabtu/13 Desember 2025	Kuis DJPI	Tim Kompu	Feed	
Minggu / 14 Desember 2025	Repost Kementerian PU		Reels	
Senin/ 15 Desember 2025	Komparasi pemilahan dan pengolahan sampah terkait proyek Putri Cempo menjadi waste to energy. (Dibagi dua bisa menjadi listrik atau bricket)	PPICK	Feed	Menunggu materi dan foto (edukasi rangkaian cerita)
Selasa, 16 Desember 2025	Konten edukasi PPISDA	PPISDA		Infografis: Skema Pembayaran dalam KPBU SDA <ul style="list-style-type: none"> • AP (Availability Payment) • User Charge • Hybrid Disederhanakan dengan analogi sehari-hari.
Rabu/ 17 Desember 2025	Video Testimoni Kemitraan JICA	PSSPP		Dikoordinasikan

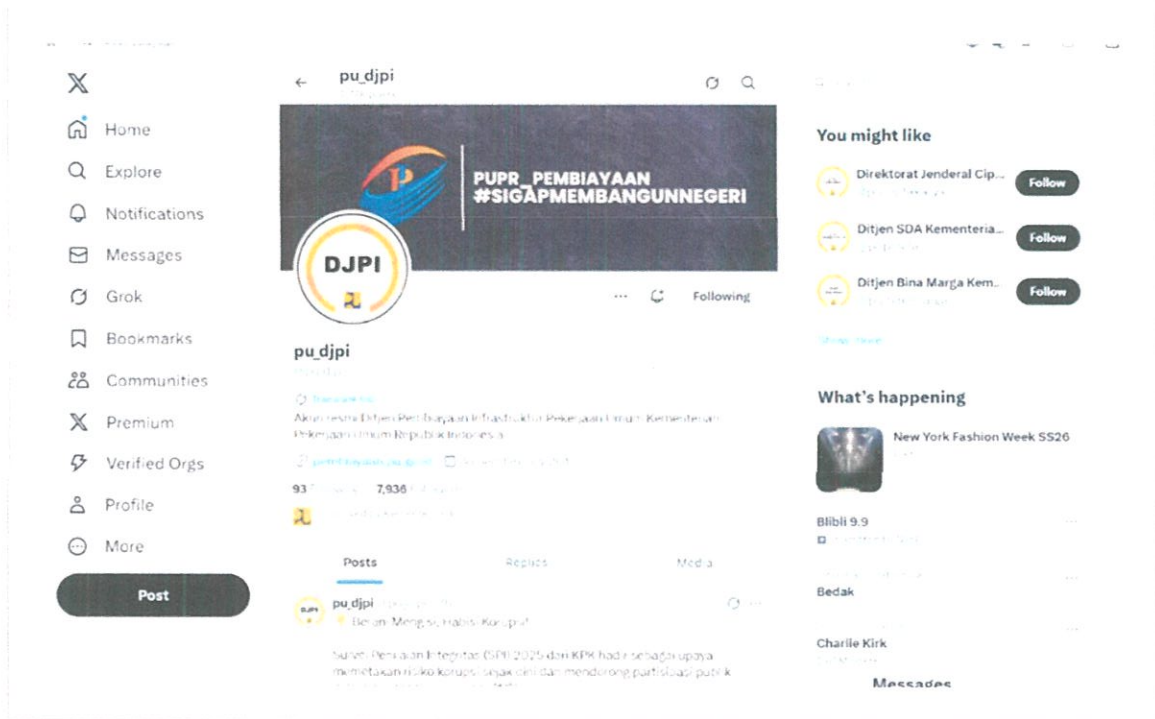
Kamis/ 18 Desember 2025	Video Testimoni SPAM Jatiluhur I	Kompu dan PPICK	Reels	
Jumat/ 19 Desember 2025	Flyer Webinar Genmud DJPI	Tim Kompu	Feed	
Sabtu/ 20 Desember 2025	Kuis DJPI	Tim Kompu	Feed	
Minggu/ 21 Desember 2025	#Repost @KementerianPU	Kompu dan Genmud DJPI		
Senin/ 22 Desember 2025	Konten e-Jafung API	Mas Rio Kepegawalan/ Atika	Reels	
	Hari Ibu			
	Liputan webinar Genmud DJPI			
Selasa/ 23 Desember 2025	Video Testimoni PPIBM	Tim Kompu dan PPIBM	Feed	Testimoni tentang nataru
Rabu/ 24 Desember 2025	Konten SMAP Seluruh Uker DJPI	Kompu dan PIC Uker	Feed	
Kamis / 25 Desember 2025	Ucapan Hari Natal	Tim Kompu	Feed	
Sabtu/ 27 Desember 2025	Repost Informasi Nataru	IG Kemenpu		
Minggu/ 28 Desember 2025	Konten Edukasi PPIBM : "Perjalanan Nataru Lebih Lancar Berkat KPBU"	PPIBM	Feed	"Perjalanan Nataru Lebih Lancar Berkat KPBU" Angle: Menjelaskan bagaimana proyek KPBU membantu meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan jelang arus mudik Nataru. Isi kunci:

				<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas ruas jalan baru hasil KPBU • Jembatan strategis yang memperpendek waktu tempuh • Dampak langsung bagi mobilitas masyarakat saat liburan Nataru
Senin/ 29 Desember 2025	Infografis komparasi Solicited dan unsolicited	PSSPP	Feed	
Selasa/ 30 Desember 2025	Konten KPBU CK: Belajar KPBU dari Kota-Kota Dunia	PPICK	Feed	Belajar KPBU dari Kota-Kota Dunia” Fokus: Praktik negara lain pada air minum & sanitasi. Angle menarik: Gaya storytelling kota-kota inspiratif.
Rabu/ 31 Desember 2025	Video Kaleidoskop DJPI 2025	Tim Kompu	Reels	
Kamis/ 1 Januari 2026	Ucapan Selamat Tahun Baru	Kompu	Feed	

Instagram DJPI



X DJPI



Facebook DJPI



Tiktok DJPI



Youtube DJPI



2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Laporan Layanan Informasi Triwulan IV Tahun 2025

1. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui aplikasi SP4N-LAPOR tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Oktober	0	0	0
2.	November	0	0	0
3.	Desember	0	0	0

2. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui media sosial sebanyak satu pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Oktober	0	0	0
2.	November	1	0	1
3.	Desember	0	0	0

3. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui datang langsung/persuratan tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Oktober	0	0	0
2.	November	0	0	0
3.	Desember	0	0	0

4. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui E-mail sebanyak satu pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Oktober	0	0	0
2.	November	0	0	0
3.	Desember	1	0	1

Seluruh pengaduan dan permohonan informasi yang masuk ke DJPI telah dikelompokkan berdasarkan unit kerja terkait, guna mempermudah proses tindak lanjut dan evaluasi pelayanan. Rincian klasifikasi pengaduan maupun permohonan informasi per unit kerja adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pengaduan	Jenis Pengaduan
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	2	Informasi Jafung API
2.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	0	-
3.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Sumber Daya Air	0	-
4.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Bina Marga	0	-
5.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Cipta Karya	0	-

2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilakukan dengan klasifikasi sesuai ketentuan, yaitu:

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di Kementerian Pekerjaan Umum

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
<u>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</u>								
1	Seluruh Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Seluruh unit eselon II	Seluruh unit eselon II	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy dan Hardcopy	5 tahun	
2	Seluruh Unit organisasi	Daftar Pejabat Struktural dan/ atau fungsional	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	
3	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	
4	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement)	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Berkala, Jakarta	Softcopy	2 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
Informasi yang wajib <u>Disediakan dan Diumumkan</u> SECARA BERKALA								
5	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Audited)	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	
6	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Setiap enam bulan sekali, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
7	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang agenda kegiatan Kementerian yang telah, sedang dan akan dijalankan	Masing-masing unit organisasi	Masing- masing unit organisasi	Setiap ada perubahan agenda kegiatan, di Jakarta	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
8	Seluruh Unit organisasi	Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR (Jurnal, Buletin, brosur, pemberitaan website, press release)	Masing-masing unit organisasi/UPT	Masing- masing unit organisasi/UPT	Setiap ada kegiatan dan tempat menyesuaikan	Softcopy	1 tahun	
9	Seluruh Unit organisasi	Program-program prioritas lingkup Kementerian PUPR	Masing-masing unit organisasi	Masing- masing unit organisasi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	

Informasi yang wajib tersedia setiap saat
di Kementerian Pekerjaan Umum

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
10	Seluruh Unit organisasi	Agenda Kerja Pimpinan dan Pejabat Eselon I	Sekretariat masing- masing unit organisasi	Sekretariat masing- masing unit organisasi	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy	1 tahun	
11	Seluruh Unit Organisasi	Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Masing-masing unit organisasi	Masing- masing unit organisasi	Setiap tahun, Jakarta	Hardcopy / Softcopy	5 tahun	
12	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy/ Softcopy	Selama masa berlaku	
13	Seluruh Unit organisasi	Daftar dan dokumen Kesepakatan Bersama/MoU	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Waktu dan tempat menyesuaikan kesepakatan tersebut	Hardcopy	Selama masa kesepakatan/MoU berlaku	
14	Seluruh Unit organisasi	Profil infrastruktur bidang PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Menyesuaikan dengan lokasi infrastruktur	Softcopy/ Hardcopy	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
15	Seluruh Unit organisasi	Laporan Barang Milik Negara	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	5 tahun	
16	Seluruh Unit organisasi	Standar Operasional Prosedur kerja lingkup Kementerian PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	Selama masa berlaku	

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
17	DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Pipeline proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang <u>infrastruktur</u> PUPR	Direktorat PPISDA, PPIJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJ, PPIP, PPP	Setiap ada <u>perubahan</u> , Jakarta	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	
18		Profil proyek KPBU seluruh sektor, meliputi: - <u>Penanggung Jawab Proyek</u> - Skema Kerja Sama - Masa Kerja Sama - <u>Pengembalian Investasi</u> - IRR - NPV - <u>Struktur Proyek</u> - <u>Timeline pelaksanaan proyek</u>	Direktorat PPISDA, PPIJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJ, PPIP, PPP	Setiap ada <u>perubahan</u> , Jakarta	Hardcopy, Softcopy	6 tahun	
19		Informasi Umum, Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 tahun	
20		Data Realisasi Subsidi, Bantuan Uang Muka, Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan <u>perbaharuan</u> data minimal <u>seminggu</u> sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	
21		Data Realisasi Subsidi, Bunga Kredit Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan <u>perbaharuan</u> data minimal <u>seminggu</u> sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	

Informasi yang wajib tersedia setiap saat
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
22	DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Informasi Publik terkait Sistem Registrasi Pengembangan (SIRENG) - Nama <u>Pengembang Perumahan</u> - Asosiasi tempat <u>Pengembang Perumahan</u> tersebut <u>bernaung</u> - Alamat <u>Pengembang Perumahan</u> - Status <u>Pengembang Perumahan</u> (Terdaftar/Tidak Terdaftar di SIRENG)	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Tampilan data <u>Pengembang</u> di aplikasi SIRENG	Per Tahun	
23		Informasi Publik <u>Simpul KPBU</u> - Jumlah Data <u>Proyek KPBU</u> meliputi <u>Penyiapan s/d Konstruksi dan Operasi</u> - Informasi terkait <u>profil proyek KPBU beserta data teknisnya</u>	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Subdirektorat Kepatuhan Intern	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Informasi dan Data Teknis yang ditampilkan di Website SIMPUL KPBU	Per Tahun	

2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) terus berupaya menciptakan dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga output akhirnya dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menyediakan Layanan Informasi Publik secara langsung yang berada di kantor DJPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, dan pelayanan konsultasi.

Unit Layanan Informasi Publik nantinya bermanfaat dalam memberikan dan membantu para pemohon atau pihak-pihak berkepentingan dalam mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan profesional.

Gambar Booth Pelayanan Informasi DJPI

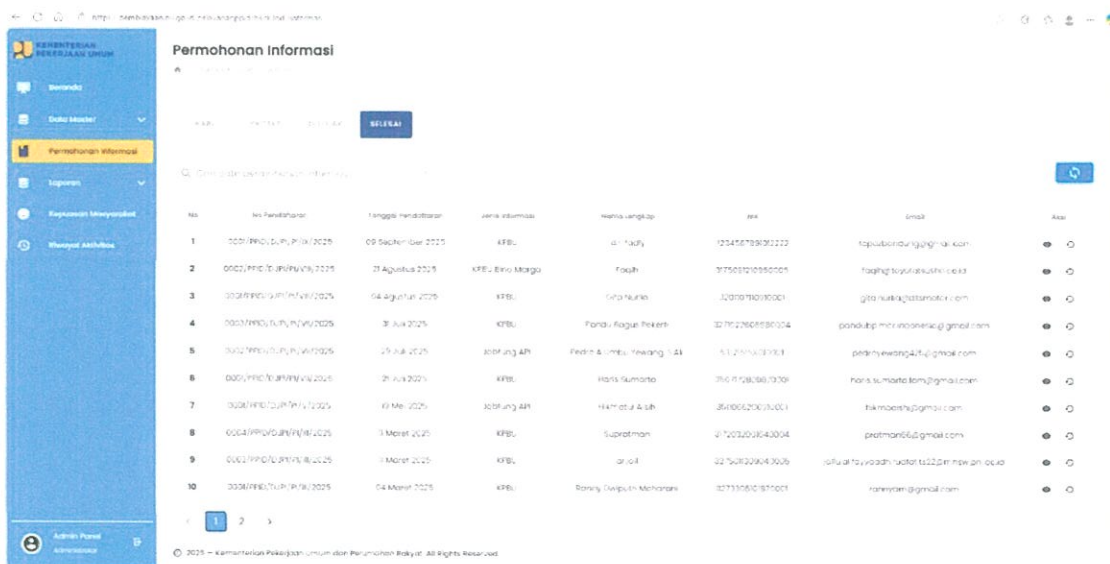


Booth layanan informasi publik DJPI telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa **televisi interaktif** yang digunakan sebagai **media penyampaian informasi kepada masyarakat**. Melalui TV tersebut, pengunjung dapat memperoleh berbagai penjelasan mengenai program, kegiatan, kebijakan, serta capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) secara visual dan menarik.

2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik DJPI berinovasi dengan membuat suatu sistem penanganan pengaduan terpadu yang melibatkan PIC disetiap unit kerja melalui PPID DJPI:

<https://pembiayaan.pu.go.id/pelayananppid/b4ck3nd!>



No	No Permohonan	Tanggal Penditeraan	Jenis Informasi	Nama Pengaduan	No	Email	Aksi
1	0001/PPID/DJPI/PU/2025	09 September 2025	KIRBU	di Nady	024567890123	topubandura@gmail.com	• •
2	0002/PPID/DJPI/PU/2025	21 Agustus 2025	KIRBU	Eko Margo	97560101050001	raidingtopubandura@gmail.com	• •
3	0003/PPID/DJPI/PU/2025	04 Agustus 2025	KIRBU	Gita Nurul	3201071010001	gita.nurul@gmail.com	• •
4	0004/PPID/DJPI/PU/2025	31 Juli 2025	KIRBU	Pandu Nugul Pekerja	32702260880004	ponditp.mirvianoneng@gmail.com	• •
5	0005/PPID/DJPI/PU/2025	25 Juli 2025	Jatung 4R	Pedrih & Umil, Hwang, S. A.	512101010101	pedrihewang4r@gmail.com	• •
6	0006/PPID/DJPI/PU/2025	21 Juli 2025	KIRBU	Haris Sumarto	35010108001001	haris.sumarto@gmail.com	• •
7	0007/PPID/DJPI/PU/2025	19 Mei 2025	Jatung 4R	Hafidul A. S.	35400520010001	hafidul@gmail.com	• •
8	0008/PPID/DJPI/PU/2025	11 Maret 2025	KIRBU	Supriatman	27020201040004	supriatman65@gmail.com	• •
9	0009/PPID/DJPI/PU/2025	11 Maret 2025	KIRBU	Arif	02500200040006	arifahfayyadh@nastor1222@gmail.com	• •
10	0010/PPID/DJPI/PU/2025	04 Maret 2025	KIRBU	Rony Dwi Puji Mekar	32713060101001	ronenr@gmail.com	• •

Dashboard Pengaduan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, telah dilakukan serangkaian perubahan dan perbaikan sistematis. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

1. Digitalisasi Rekapitulasi Data

Sebelumnya, rekapitulasi data pemohon beserta dokumen pendukung masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakteraturan data. Kini, seluruh data telah terdokumentasi secara digital dalam *dashboard layanan*, sehingga memudahkan pelacakan dan pengarsipan informasi.

2. Integrasi Layanan Pengaduan dan Permohonan Informasi

Sebelumnya, penanganan pengaduan dan permohonan informasi dilakukan secara terpisah dari berbagai kanal. Kini, layanan tersebut telah terintegrasi melalui satu *dashboard layanan*, yang memungkinkan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik.

3. Pemantauan Batas Waktu Layanan

Pada tahap awal, monitoring terhadap batas waktu pelayanan dilakukan secara manual. Kini, setiap pengaduan dan permohonan informasi sudah termonitor otomatis melalui *dashboard pengaduan*, sehingga meminimalkan potensi keterlambatan.

4. Penetapan Penanggung Jawab (PIC)

Dahulu belum terdapat penanggung jawab yang jelas dari setiap unit kerja terkait pengelolaan pengaduan dan permohonan informasi. Saat ini telah dibentuk *Penanggung Jawab (PIC)* di masing-masing unit kerja melalui **SK PIC Penanganan Pengaduan**, untuk memastikan tanggung jawab dan tindak lanjut berjalan efektif.

5. Penyusunan Tata Kelola dan SOP

Sebelumnya belum tersedia tata kelola yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Kini, telah disusun **Proses Bisnis dan SOP Penanganan Pengaduan DJPI**, yang menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan layanan tersebut.

6. Peningkatan Transparansi Informasi

Sebelumnya, informasi terkait penanganan pengaduan dan permohonan informasi belum disampaikan secara transparan. Saat ini, sistem yang diterapkan memungkinkan penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

2.7 Survei Layanan Informasi Publik

Pada Laporan Semester I Tahun 2025 setelah permohonan dapat diproses telah dilakukan survey melalui form yang dikirimkan langsung kepada pemohon untuk mempermudah melakukan penilaian sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan DJPI. Penilaian ini berdasarkan penilaian terhadap 9 unsur penilaian antara lain:

1. Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya,
2. Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini,
3. Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan,
4. Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan,
5. Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan,
6. Unsur tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan,

7. Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan,
8. Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana
9. Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. Yang menjadi acuan dalam standar layanan informasi publik di DJPI.

1	Unsur	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
2	Total Nilai Persepsi	79	79	80	81	81	80	82	80	85
3	IKM	3.29	3.29	3.33	3.38	3.38	3.33	3.42	3.33	3.54
4	Konversi Nilai IKM	82.29	82.29	83.33	84.38	84.38	83.33	85.42	83.33	88.54
5	Mutu Pelayanan	B	B	B	B	B	B	B	B	A
6	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
7										
8	NILAI SKM UPT	84.1435185								
9	MUTU PELAYANAN	B								
10	KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik								
11										
12	Keterangan									
13	U1	Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya								
14	U2	Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini								
15	U3	Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan								
16	U4	Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan								
17	U5	Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan								
18	U6	Unsur tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan								
19	U7	Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan								
20	U8	Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana								
21	U9	Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan								
22										

Perhitungan SKM

Berdasarkan data Indeks Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik DJPI pada Semester I hal ini masyarakat memberikan penilaian terhadap layanan informasi publik dengan nilai **BAIK** dengan mutu pelayanan B.

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan DJPI pada prinsipnya telah berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut atas Kendala tersebut antara lain:

3.1 Kendala Layanan Informasi Lingkup Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

1. Kapasitas dan kompetensi SDM dalam layanan informasi yang masih perlu ditingkatkan, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, khususnya terkait keterbukaan informasi publik, pengelolaan data, dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Perubahan Regulasi dan Kebutuhan Informasi Publik yang dinamis, sehingga perkembangan regulasi dan meningkatnya kebutuhan Masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat menuntut organisasi untuk terus beradaptasi, sementara sistem dan sumber daya masih terbatas

3.2 Kendala dalam Layanan Informasi Lingkup Unit Kerja

1. Koordinasi Antar Unit Kerja Belum Optimal, dalam praktiknya, permohonan informasi publik seringkali memerlukan koordinasi lintas unit kerja. Namun, mekanisme koordinasi yang belum berjalan efektif menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan dan penyampaian informasi kepada pemohon.
2. Kurangnya Pemutakhiran Data dan Informasi Secara Berkala, data dan informasi yang dikelola oleh unit kerja belum seluruhnya diperbarui secara rutin. Hal ini menyebabkan sebagian informasi yang tersedia tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi kepada publik.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka peningkatan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dapat melaksanakan rekomendasi dan tindaklanjut antara lain:

4.1 Rekomendasi

1. Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Informasi Publik Terintegrasi, Diperlukan penyusunan standar dan format layanan informasi publik yang seragam di seluruh unit kerja, mencakup konten, tata cara penyajian, dan media publikasi, guna meningkatkan konsistensi dan kualitas informasi.
2. Penguatan Sistem pengelolaan Informasi Publik berbasis Digital, Organisasi perlu mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan atau penguatan sistem pengelolaan informasi publik yang terintegrasi dan mudah diakses.
3. Penguatan Koordinasi dan Peran PPID di Lingkungan DJPI, Perlu memperkuat peran PPID sebagai koordinator layanan informasi publik, termasuk dalam hal pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi unit kerja dalam penyediaan informasi.

4.2 Tindak Lanjut

1. Inventarisasi dan Pemutakhiran Informasi Publik, melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi publik pada masing-masing unit kerja, khususnya informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan serta-merta.
2. Optimalisasi Kanal Layanan Informasi Publik, Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi, media sosial, dan kanal layanan informasi lainnya sebagai sarana utama penyampaian informasi publik kepada masyarakat.